

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SDN KUTANAGARA II: TINJAUAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

Hinggil Permana¹⁾, Siti Maemunah²⁾, Sabrina Aisyah Putri³⁾, Ruhiyati Aulia⁴⁾

¹²³⁴⁾ Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang

e-mail : hinggil.permana@fai.unsika.ac.id, sitimaemunah.at@gmail.com, brinaabrina09@gmail.com, ruhiyatiuliaaaa41@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Financial Management, Education, at ELEMENTARY SCHOOL KUTANAGARA II.</p> <p>Kata kunci: Pengelolaan Pembiayaan, Pendidikan, Di SDN KUTANAGARA II.</p>	<p>The purpose of this study is to examine how SDN KUTANAGARA II Karawang manages its educational funds, which are crucial to the efficient operation of the school's instructional programs. The efficacy of using school financing sources, financial management's accountability and openness, efforts to lower financial management errors, and the use of school finances to raise classroom instruction quality are the main topics of this study. The management of education funding at SDN KUTANAGARA II Karawang is highlighted in a single case study using a qualitative research methodology. Interviews, documentation, and observation were used to gather data. According to the study's findings, SDN KUTANAGARA II Karawang had no trouble securing funding for schooling.</p> <p>Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana SDN KUTANAGARA II Karawang mengelola dana pendidikannya, yang sangat penting bagi kelancaran operasional program pengajaran sekolah. Kemanjuran penggunaan sumber pembiayaan sekolah, akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan, upaya untuk mengurangi kesalahan pengelolaan keuangan, dan penggunaan keuangan sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajaran di kelas merupakan topik utama penelitian ini. Pengelolaan dana pendidikan di SDN KUTANAGARA II Karawang disorot dalam satu studi kasus dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut temuan penelitian, SDN KUTANAGARA II Karawang tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana untuk sekolah.</p>

PENDAHULUAN

Mendorong dan memperluas kemajuan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. modern zaman ini sesuatu yang wajar dan penting. Pendidikan merupakan bagian dari budaya masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang demi menemukan bentuk Sesuai dengan dinamika sosial yang terus berubah di masyarakat setiap negara. Selain itu, pendidikan sangat penting karena berperan dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan menjadi pilar utama sebuah bangsa, dalam pembukaan UUD 1945, Tujuan pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan dan

pengetahuan masyarakat untuk kemajuan bangsa, melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan menciptakan perdamaian dunia. Di era saat ini suatu kualitas suatu bangsa dipengaruhi oleh kecerdasan dan kompetensi tenaga kerja saat ini mampu bersaing. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas dengan kualitas yang merata, baik di perkotaan maupun pedesaan, dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Adapun salah satu hal yang sangat penting di perhatikan dalam menjalankan pendidikan adalah masalah pembiayaan. Menurut Kusumadewi (2015), pembiayaan pendidikan mempengaruhi kualitas pendidikan di semua jenjang, termasuk penganggaran Setiap tahun, pemerintah daerah memberikan gaji kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengalokasikan setidaknya 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan setiap tahun, pendanaan tetap memegang peran penting dalam meningkatkan Mutu pendidikan, baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Semua kegiatan pendidikan memerlukan biaya, dan menurut Anwar (2016), peranan pendidikan selalu terkait dengan berbagai aktivitas yang memerlukan biaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selama proses ini, muncul masalah yang berkaitan dengan biaya pendidikan. (Muspawi & Lukita, 2023)

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan jenis penelitian yang lebih mengutamakan penggunaan deskripsi verbal untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data atau fenomena yang telah dikumpulkan.

Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal yang difokuskan Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Pendekatan yang digunakan adalah yang bersifat kualitatif. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi makna di balik pengalaman individu atau kelompok, yang dihasilkan dari isu-isu sosial atau kemanusiaan yang mereka hadapi. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai metode penelitian yang tidak menghasilkan data berupa angka atau statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua rakyat Indonesia berhak atas pendidikan. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses ke pendidikan yang sama sesuai dengan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Sesuai dengan Dalam Pasal 31 ayat 4, Negara Indonesia meminta kepada pemerintah untuk mengalokasikan 20 persen dari anggaran belanja negara. untuk pendidikan. Namun, faktanya tidak semua anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini karena biaya pendidikan yang mahal.

Agar Kementerian Pendidikan Nasional dapat memberikan layanan pendidikan dengan misi yang meliputi mutu, relevansi, pemerataan, kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kepastian dalam memperoleh pendidikan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur semua masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Kesadaran masyarakat akan menemukan bahwa pendidikan yang bermutu harus dimulai dengan biaya yang dibebankan karena, menurut prinsip yang mendasarinya, biaya ini mendorong masyarakat untuk terlibat penuh dalam proses evaluasi pendidikan. Perencanaan peran dalam konteks ini mengacu pada proyek tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Identifikasi, manajemen inventaris, dan

kebutuhan berdasarkan prioritas, hasil spesifik yang diinginkan, mengidentifikasi persyaratan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan tujuan alternatif, strategis, dan dapat dicapai semuanya merupakan bagian dari proses perencanaan. Pentingnya pendidikan berasal dari kompleksitas masyarakat saat ini, termasuk pertumbuhan karyawan, kebutuhan terkait pekerjaan, masalah lingkungan, dan perjuangan sehari-hari. Perencanaan berfungsi untuk merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan cakupan pekerjaan, mengidentifikasi personel yang terlibat, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, serta menetapkan prosedur dan metode kerja berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi. Semua elemen ini menjadi panduan utama dalam mengelola tenaga manusia dalam pendidikan, serta dalam mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya guna mencapai tujuan tertentu. Selain itu, perencanaan dapat digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian tujuan. Dengan perencanaan yang strategis, menyeluruh, dan terintegrasi, kesalahan dan kekeliruan dapat diminimalkan. (Ara & Imam, 2010)

Hasil Observasi di SDN Kutanagera II Secara sepintas, pembiayaan pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yang paling umum adalah biaya tetap. Menurut Anwar (1991), biaya langsung merupakan jenis pembayaran yang secara khusus digunakan untuk memberi tahu masyarakat tentang kegiatan pendidikan, termasuk pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ini mencakup berbagai bentuk bantuan yang secara langsung berkaitan dengan subjek dan proses pendidikan, seperti penyediaan sarana dan prasarana untuk belajar, pembelian peralatan peraga, sarana untuk belajar, dan biaya transportasi. Salah satu jenis biaya jangka panjang adalah biaya rutin, yang digunakan untuk mendukung operasi pendidikan selama satu tahun. Dana ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pendanaan program pendidikan, membayar guru dan staf sekolah, tugas-tugas administratif, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Selain itu, Hallak (1985) menjelaskan bahwa reformasi pendidikan terdiri dari berbagai komponen.

Ada beberapa sumber yang dapat dilakukan untuk membiayai pendidikan. Ini termasuk biaya dari pemerintah pusat dan daerah, orang tua dan wali siswa, bukan orang tua dan wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Pembiayaan pendidikan nasional disusun berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Pemerintah menegaskan terkait pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai perundang undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk tujuan pendidikan dan bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang menghadapi kesulitan untuk membayar biaya pendidikan yang memenuhi syarat. Dana BOS merupakan program pemerintah yang menyalurkan bantuan dana langsung kepada lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Jumlah dana yang diterima oleh sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa serta besaran biaya bantuan per siswa. Program ini bertujuan untuk membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan biaya operasionalnya. Untuk memperhatikan siswa miskin, sekolah harus membebaskan siswa miskin dari biaya sekolah dan biaya kegiatan ekstrakurikuler serta iuran sekolah. Karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata baik dari segi jumlah sekolah maupun jumlah siswa, cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum. Sekolah yang menolak Program BOS ini biasanya cukup kaya. Pengelola sekolah membuat keputusan sendiri untuk menolak Program BOS tanpa berkonsultasi dengan orangtua siswa. (Sudarmono et al., 2021)

Implementasi Pengelolaan Pembiayaan di SDN Kutanagara II. Di SDN Kutanagara II, kebijakan pembiayaan pendidikan diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya.

a) Pengelolaan Dana BOS

Dana BOS merupakan salah satu sumber pembiayaan utama di SDN Kutanagara II. Sekolah menggunakan dana ini untuk berbagai keperluan, termasuk: Pengadaan sarana pembelajaran seperti buku dan alat tulis. Pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler dan peningkatan kompetensi guru. Pemeliharaan fasilitas sekolah seperti ruang kelas dan perpustakaan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan alokasi yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan aktual sekolah. Hal ini kadang menyebabkan terhambatnya program-program yang direncanakan.

b) Transparansi dan Akuntabilitas

Sekolah berusaha untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana, dengan melibatkan komite sekolah dan melakukan pelaporan rutin kepada masyarakat. Meski demikian, ada beberapa tantangan dalam memastikan semua pihak memiliki akses yang memadai terhadap informasi pengelolaan dana. Akuntabilitas dalam penggunaan dana masih memerlukan peningkatan, terutama dalam pelaporan keuangan yang lebih rinci dan dapat diakses oleh publik.

c) Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

SDN Kutanagara II juga berupaya melibatkan orang tua murid dan masyarakat dalam pengelolaan pembiayaan, melalui pertemuan komite sekolah dan musyawarah bersama. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

Meskipun ada kebijakan yang jelas dan bantuan finansial yang diberikan, SDN Kutanagara II menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya:

- 1) Keterbatasan Anggaran: Dana BOS dan kontribusi lainnya terkadang tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah, terutama untuk pengembangan fasilitas dan peningkatan kualitas pengajaran.
- 2) Manajemen Keuangan yang Efektif: Tidak semua sekolah memiliki tenaga administrasi yang terlatih dalam manajemen keuangan, sehingga pengelolaan dana sering kali kurang optimal.
- 3) Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur yang ada di sekolah kadang tidak memadai, dan keterbatasan dana membuat sekolah sulit melakukan perbaikan atau pengembangan yang diperlukan.

Untuk meningkatkan pengelolaan pembiayaan di SDN Kutanagara II, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas Pengelola Sekolah: Mengadakan pelatihan manajemen keuangan untuk kepala sekolah dan staf administrasi guna memastikan penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien.
- b. Transparansi yang Lebih Baik: Membangun sistem pelaporan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua murid dan masyarakat sekitar.
- c. Diversifikasi Sumber Pendanaan: Mendorong sekolah untuk mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui kerjasama dengan pihak swasta atau alumni, guna menambah dana operasional.(Anggraini, 2013)

KESIMPULAN/CONCLUSION

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan amanat UUD 1945, yang menetapkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Namun, realitanya, masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai, terutama karena mahalnya biaya pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan program-program seperti Dana BOS untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama yang kurang mampu.

Di SDN Kutanagara II, pengelolaan pembiayaan pendidikan, termasuk Dana BOS, dilakukan melalui berbagai langkah strategis, meskipun masih terdapat tantangan seperti keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan anggaran. Pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dengan masyarakat dalam pengelolaan dana menjadi sorotan untuk meningkatkan kepercayaan dan efektivitas penggunaan dana. Selain itu, peningkatan kapasitas manajemen keuangan di sekolah, diversifikasi sumber pendanaan, dan perbaikan infrastruktur juga diperlukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik dan merata bagi semua siswa.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Anggraini, R. D. (2013). Transparansi , Partisipasi , dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(2), 201–208.
- Ara, H., & Imam, M. (2010). Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola sekolah dan Madrasah). *Digital Library, Uin Sunan Gunung Djati*, 36. <https://etheses.uinsgd.ac.id/30324/>
- Muspawi, M., & Lukita, M. (2023). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Lectura : Jurnal Pendidikan*, 14(1), 99–110. <https://doi.org/10.31849/lectura.v14i1.12237>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>